

ANALISIS FAKTOR PEMICU SELISIH ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

Avrilla Kuswardani ¹⁾, Maya Hamidah ²⁾, Muhammad Faqih Zamani ³⁾, Musthafa Kamil ⁴⁾

¹⁻⁴ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika
email: avrillakuswardani@gmail.com, myyhmhdh@gmail.com,
faqihaqrm@gmail.com, h.musthafa.hmk@bsi.ac.id

Abstract

This study analyzed the trigger factors for budget differences and revenue realization in the Ministry of Finance in 2023. The Ministry of Finance plays an important role in the management of finance and the realization of state revenues. The goal of this analysis explains the factors that trigger the difference between the budget that has been set and the realization of income in the Ministry of Finance. The method used in this analysis is quantitative descriptive in analyzing financial data relevant to the Ministry of Finance. The data used in this analysis are the Annual Financial Report and APBN published by the Ministry of Finance. Analysis of budget differences and realization of revenue in the Ministry of Finance in 2023 showed mixed results in various revenue posts. Domestic tax revenues are realized at 102.16% of the budget, positive indicators such as economic stability and mining sector contributions, although they still face challenges in certain sectors. International trade tax revenues only reached 88.47% of the budget due to a decrease in import value and fluctuations in commodity prices. For Non-Tax State Revenue, the General Service Agency's revenue reached 106.94% of the target due to improved banking services and education fund management, as well as the realization of other non-tax revenue even exceeded 160% of the target due to good financial management, interest income, and fines.

Keywords: Anggaran, Realisasi Pendapatan, Kementerian Keuangan

1. PENDAHULUAN

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan negara yang bertujuan memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa mencari keuntungan. Kementerian keuangan merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam menyusun dan melaksanakan anggaran untuk keberlanjutan pembangunan. [1]

Anggaran merupakan rencana keuangan yang disusun untuk suatu periode tertentu mencakup pendapatan dan belanja suatu instansi, dalam mencapai tujuannya. Anggaran tidak hanya bersifat sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja. Anggaran memiliki beberapa fungsi utama yaitu sebagai alat perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Penyusunan anggaran yang akurat dan tepat sangat penting bagi kementerian untuk realisasi pendapatan. Pada tahun 2023, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

menyusun anggaran pendapatan perpajakan dan pendapatan negara non pajak sebesar Rp 2.165.098.490.690.000. Penerimaan perpajakan terealisasi 101,69% dari anggaran yang telah ditetapkan. Sedangkan Penerimaan Negara Non Pajak terealisasi 107,91%. [2]

Negara pasti memiliki tujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas operasional, termasuk dalam aspek sarana, prasarana, pelayanan, dan pencapaian keuntungan. Selisih antara anggaran dan pendapatan sering kali menjadi indikator adanya masalah dalam pengendalian keuangan. [3] Anggaran pendapatan dan belanja negara memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara, tidak hanya sebagai sumber pembiayaan kegiatan pemerintah tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi. Anggaran digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan yang efektif, belanja pemerintah dapat berfungsi sebagai

stimulus bagi sektor-sektor strategis, sekaligus mencerminkan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika ekonomi. [4]

Realisasi pendapatan sering kali terjadinya selisih lebih besar maupun lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Realisasi pendapatan kementerian keuangan lebih besar dari anggaran, yang artinya lebih banyak pendapatan yang tersedia untuk mendanai program yang sudah direncanakan maupun program darurat. Realisasi pendapatan yang melebihi anggaran menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan pengumpulan pendapatan non-pajak. [3]

Belanja pemerintah berperan sebagai instrumen utama untuk mendorong perekonomian, terutama saat sektor swasta melemah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), belanja pemerintah diusulkan oleh presiden dan disetujui oleh DPR, mencerminkan prioritas pembangunan nasional. Akuntabilitas atas pelaksanaan anggaran ini diwujudkan melalui laporan keuangan pemerintah, yang menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara atau daerah dalam satu periode anggaran tertentu. [5] Laporan ini penting untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan dana publik.

Dan Kementerian Keuangan adalah salah satu dari sepuluh kementerian/lembaga di Indonesia dengan alokasi anggaran terbesar, mencerminkan perannya yang strategis dalam mengelola keuangan negara. [6] Sebagai pengelola utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kementerian ini bertanggung jawab atas perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan anggaran, termasuk pendapatan perpajakan, belanja negara, serta pengelolaan utang. Besarnya alokasi anggaran menunjukkan prioritas yang diberikan untuk memastikan stabilitas fiskal, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mendukung program pembangunan nasional.

Pengendalian biaya yang efektif bergantung pada penerapan sistem pengendalian manajemen yang terencana dengan baik. Perencanaan memberikan manfaat berupa

panduan operasional sehari-hari yang membantu pimpinan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. [1] Dengan perencanaan yang baik, organisasi dapat menetapkan arah yang jelas, memonitor kinerja secara efisien, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang diinginkan.

Selisih antara anggaran dan realisasi pendapatan di Kementerian Keuangan yang kami dapat dari penelitian disebabkan oleh berbagai faktor, seperti Penerimaan perpajakan dalam negeri melampaui target (102,16%) berkat stabilitas ekonomi dan kontribusi sektor pertambangan, meskipun masih menghadapi tantangan di beberapa sektor. Sebaliknya, penerimaan pajak perdagangan internasional hanya mencapai 88,47% akibat penurunan nilai impor dan fluktuasi harga komoditas. Pendapatan non-pajak pada Badan Layanan Umum (106,94%) dan kategori lainnya (160,88%) menunjukkan pengelolaan yang optimal dari berbagai sumber, termasuk jasa perbankan, dana pendidikan, dan denda.

Penelitian analisis ini bertujuan menjelaskan faktor-faktor pemicu perbedaan antara anggaran yang telah ditetapkan dan realisasi pendapatan di Kementerian Keuangan. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah deskriptif kuantitatif dalam menganalisis data keuangan yang relevan dengan Kementerian Keuangan. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah Laporan Keuangan Tahunan dan APBN yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Analisis perbedaan anggaran dan realisasi penerimaan di Kementerian Keuangan pada 2023 menunjukkan hasil campuran di berbagai pos penerimaan.

2. METODE PENELITIAN

Analisis ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menganalisis data keuangan yang relevan dengan Kementerian Keuangan. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipublikasi oleh Kementerian Keuangan. Dengan mengakses dan mengolah data yang tersedia dalam laporan-laporan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk

memperoleh gambaran kuantitatif mengenai selisih anggaran dan realisasi pendapatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) adalah lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan fiskal dan struktur ekonomi makro, termasuk penganggaran dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 yang disajikan telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan Laporan Keuangan Kemenkeu RI yang diperoleh di situs web resmi Kementerian Keuangan, anggaran dan realisasi pendapatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Penerimaan Pendapatan Kementerian Keuangan

No	Uraian	2023		
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di atas (bawah) anggaran
1.	Penerimaan Negara dan Hibah			
a	Penerimaan Perpajakan	Rp 2.118.348.000.000.000	Rp 2.154.208.219.436.810	Rp 35.860.219.436.816
	Pajak Dalam Negeri	Rp 2.045.450.000.000.000	Rp 2.089.718.290.360.400	Rp 44.268.290.360.403
	Pajak Perdagangan Internasional	Rp 72.898.000.000.000	Rp 64.489.929.076.413	Rp 8.408.070.923.587
b	Penerimaan Negara Non Pajak	Rp 46.750.409.690.000	Rp 50.447.537.740.699	Rp 3.697.128.058.699
	Pendapatan Sumber Daya Alam			0
	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan			0
	Pendapatan BLU	Rp 45.911.619.196.000	Rp 49.098.107.138.793	Rp 3.186.487.942.793
	Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	Rp 838.790.490.000	Rp 1.349.430.601.906	Rp 510.640.107.906
c	Pendapatan Hibah			100,00

Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, pendapatan yang diperoleh Kementerian Keuangan berasal dari Penerimaan Pajak, Penerimaan Non Pajak dan Hibah. Pendapatan yang diterima Kementerian Keuangan sebelumnya telah disusun anggarannya berdasarkan history penerimaan periode sebelumnya. Sedangkan untuk realisasi pendapatan, dapat lebih besar maupun lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan tergantung faktor pemicunya. Berikut faktor pemicu selisih anggaran dan realisasi pendapatan pada Kementerian Keuangan:

A. Faktor Pemicu Selisih Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Penerimaan Perpajakan

a. Pajak Dalam Negeri

Sumber pendapatan terbesar negara berasal dari pajak. Dalam Kementerian Keuangan penerimaan pajak berasal dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Penerimaan ini dianggarkan sebesar Rp 2.045.450.000.000.000 dan terealisasi Rp 2.089.718.290.360.400 atau 101,16% dari anggaran yang telah ditentukan.

Secara umum realisasi pendapatan perpajakan naik 5,88% dari TA 2022. Pendapatan Pajak Dalam Negeri naik dari Rp 1.943.644.541.166 menjadi Rp 2.089.718.290.360 pada TA 2023 atau naik 7,52%. Berikut rincian penerimaan pajak dalam negeri:

Tabel 2. Data Penerimaan Pajak Dalam Negeri

Uraian	Anggaran	Realisasi
Pajak Penghasilan	1.049.540.000.000	1.061.234.020.926
Pajak Pertambahan Nilai	731.040.000.000	763.632.673.283
Pajak Bumi dan Bangunan	26.870.000.000	33.270.661.548
Pajak Cukai	227.210.000.000	221.851.144.543
Pajak Lainnya	10.790.000.000	9.729.790.061

Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2023

Penjelasan Faktor Pemicu Terjadinya Selisih Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Faktor pemicu selisih anggaran dan realisasi penerimaan pajak dalam negeri pada pajak penghasilan (PPh) adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Setoran pada Pajak Penghasilan
Salah faktor pemicu realisasi pendapatan pajak penghasilan lebih besar dibanding anggarannya karena terjadi peningkatan setoran utama yang signifikan, terutama setoran jasa yang meningkat sebesar 14,99% pada penerimaan pajak penghasilan pasal 23. Selain itu, setoran masa dan bunga juga meningkat dua digit. Sedangkan PPh pasal 25/29 Badan juga terjadi peningkatan setoran masa sebesar 12,70%, dan setoran tahunan sebesar 14,30%. Jenis setoran lainnya yang juga mengalami peningkatan adalah diskonto dan bunga obligasi pajak penghasilan final.
- 2) Pertumbuhan Sektor Ekonomi
Selanjutnya faktor yang mempengaruhi selisih realisasi pendapatan pajak penghasilan pada Kementerian keuangan adalah pertumbuhan sektor ekonomi. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan

(PPh) Pasal 23, sektor pertambangan mengalami peningkatan terbesar, diikuti oleh sektor perdagangan dan industri pengolahan. Pada realisasi PPh Pasal 25/29 orang pribadi, secara sektoral pejabat negara dan karyawan mengalami peningkatan nominal terbesar terutama subsektor pegawai swasta dengan pertumbuhan 5,03%. Perdagangan, akomodasi, dan aktivitas kesehatan juga mengalami peningkatan. Selain itu, realisasi PPh 25/29 Badan, sektor pertambangan dan aktivitas keuangan juga mengalami kenaikan. PPh Pasal 26 juga mengalami peningkatan tertinggi pada sektor Industri Keuangan, Industri Pengolahan dan Perdagangan. Dan pada PPh Final secara sektoral, sektor jasa keuangan mengalami peningkatan nominal terbesar, diikuti oleh sektor pertambangan dan perdagangan listrik.

- 3) Kenaikan Dividen, Bunga dan Royalti
Faktor pemicu realisasi pendapatan pajak penghasilan pada Kementerian keuangan adalah meningkatnya penerimaan PPh Pasal 26 pada pembayaran dividen, bunga, dan royalti ke luar negeri.
- 4) Kenaikan Penerimaan Pajak Penghasilan
Realisasi pendapatan pajak penghasilan pada Kementerian keuangan mengalami peningkatan pada PPh Final, terutama bunga deposito dan tabungan yang meningkat 51,23% sebagai akibat dari tingkat suku bunga yang meningkat.

Faktor pemicu selisih anggaran dan realisasi penerimaan pajak dalam negeri pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut:

- 1) Stabilitasnya aktivitas ekonomi dan konsumsi domestik
- 2) Pertumbuhan Sektor Ekonomi
Secara sektor peningkatan signifikan PPN Dalam Negeri terjadi pada sektor industri pengolahan, kemudian industri pengangkutan dan pergudangan, dan administrasi pemerintahan. Realisasi PPnBM DN secara sektoral didominasi oleh industri pengolahan dengan kontribusi 99,59% dan pertumbuhan 15,15%. Akomodasi juga

mengalami peningkatan PPnBM DN, tetapi belum berpengaruh signifikan dibandingkan dengan jumlah penerimaan PPnBM Dalam Negeri. Impor PPnBM (CBU) tumbuh 6,74% (yoy) sebagai akibat dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah Impor sampai dengan Desember 2023. Dengan pertumbuhan 35,54%, subsektor perdagangan kendaraan bermotor berkontribusi 83,52%, sedangkan subsektor industri kendaraan bermotor berkontribusi 11,65%, dengan pertumbuhan 161,85%.

Faktor pemicu selisih anggaran dan realisasi penerimaan pajak dalam negeri pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan Sektor Pertambangan
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diterima Kementerian Keuangan terealisasi Rp 33.568.193.331.861, atau 124,93% dari anggaran yang telah ditentukan sebesar Rp 26.870.000.000.000. Peningkatan penerimaan PBB didorong oleh kontribusi PBB sektor Pertambangan Minerba yang menyumbang 35,03% dan mengalami pertumbuhan sebesar 117,05%, serta sektor Pertambangan Migas yang berkontribusi 51,22% dengan pertumbuhan 25,39%.

Faktor pemicu selisih anggaran dan realisasi penerimaan pajak dalam negeri pada Pajak Cukai adalah sebagai berikut:

- 1) Penurunan Produksi dan Penerimaan Cukai
Penerimaan pajak cukai menurun 4,25% pada Hasil Tembakau (HT) dan Etil Alkohol (EA). Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) naik 1,25% mencapai 83,22% dari target. Kenaikan ini didorong oleh produksi yang kembali tumbuh 1,15%. Sementara itu, kinerja Penerimaan Cukai EA turun 1,13%. Penurunan tersebut dikarenakan oleh penurunan produksi bayar 1,1% dan secara total produksi EA turun 5,57%.
- b. Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional
Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional tahun 2023 tercapai 88,47%

atau sebesar Rp 64.489.929.076.413 dari target sebesar Rp 72.898.000.000.000. Penerimaan pajak perdagangan internasional diperoleh dari bea masuk dan bea keluar. Berikut rincian realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional:

Tabel 3. Data Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Bea Masuk	Rp 53.094.000.000.000	Rp50.891.757.509.000	95,85
Pendapatan Bea Keluar	Rp 19.804.000.000.000	Rp13.598.171.568.000	68,66

Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2023

Penjelasan Faktor Pemicu Terjadinya Selisih Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Faktor pemicu selisih anggaran dan realisasi pendapatan pajak perdagangan internasional pada pendapatan bea masuk adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai impor turun 8,2% dari tahun 2022.
- 2) Bea masuk turun dari komoditas utama seperti gas alam, suku cadang kendaraan, barang logam untuk konstruksi, besi baja dasar, dan bahan plastik.

Faktor pemicu selisih anggaran dan realisasi pendapatan pajak perdagangan internasional pada pendapatan bea keluar adalah sebagai berikut:

- 1) Bea Keluar Produk Sawit turun 81,2% karena penurunan harga meskipun volume meningkat.
- 2) Bea Keluar Bauksit turun 89,1% karena ekspor dihentikan sejak Maret.

Penerimaan Negara Non Pajak

Penerimaan Negara Non Pajak tahun 2023 terealisasi 107,91% sebesar Rp 50.447.537.740.699 dari anggaran yang telah ditetapkan pada APBN sebesar Rp 46.750.409.690.000. Pendapatan ini diperoleh dari Penerimaan Negara Non Pajak Badan Layanan Umum dan Penerimaan Negara Non Pajak Lainnya.

Rincian pendapatan negara bukan pajak tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Data Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum	Rp 45.911.619.196.000	Rp49.098.107.139.000	106,94
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	Rp 838.790.494.000	Rp 1.349.430.602.000	160,88

Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2023

a) Penerimaan Negara Non Pajak Badan Layanan Umum

Penerimaan Negara Non Pajak pada Badan Layanan Umum terealisasi 106,94% lebih besar dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 45.911.619.196.000. Berikut rincian penerimaan negara non pajak badan layanan umum tahun 2023:

Tabel 5. Rincian Penerimaan Negara Non Pajak Badan Layanan Umum Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Jasa Layanan Umum	Rp 43.937.491.687.000	Rp 43.767.755.461.000
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	Rp 37.921.982.000	Rp 259.872.985.000
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	-	Rp 8.178.099.000
Pendapatan Badan Layanan Umum Lainnya	Rp 1.936.205.527.000	Rp 5.062.300.593.000

Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2023

Faktor pemicu selisih anggaran dan realisasi pendapatan negara bukan pajak badan layanan umum sebagai berikut:

Meningkatnya tingkat suku bunga deposito, yang mencapai rata-rata 2,41% setiap tahun, mendorong nasabah untuk menabung di bank. Berdampak pada meningkatnya setoran, berarti lebih banyak pendapatan dari bunga, yang menyebabkan peningkatan Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU sebesar 104,17%. Selain itu, Pendapatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, yang merupakan bagian dari Jasa Layanan Umum, juga meningkat sebesar 45,43%.

- b) Penerimaan Negara Non Pajak Lainnya
Penerimaan Non Pajak Lainnya terealisasi 160,88% dari target yang ditetapkan dalam APBN. Penerimaan Negara Non Pajak Lainnya naik 7,58% dibandingkan penerimaan periode sebelumnya.

Penerimaan Negara Non Pajak Lainnya berasal dari berbagai sumber. Berikut rincian penerimaan negara non pajak lainnya yang diterima Kementerian Keuangan Tahun 2023:

Tabel 6. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Uraian	Anggaran	Realis
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	Rp 84.364.206.000	Rp 170.51
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	Rp 1.505.400.000	Rp 2,46
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	-	Rp 1,04
Pendapatan Jasa Lainnya	Rp 915.000.000	Rp 3,16
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	Rp 750.516.760.000	Rp 1.067,87
Pendapatan Denda	Rp 1.045.870.000	Rp 20,86
Pendapatan Lain - lain	Rp 443.258.000	Rp 83,55

Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2023

Penjelasan Faktor Pemicu Terjadinya Selisih Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Faktor pemicu selisih anggaran dan realisasi pendapatan negara non pajak lainnya pada pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Pendapatan Bunga dan Pengelolaan Keuangan
Realisasi pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan pengelolaan keuangan mencapai 142,29% dari anggaran yang telah ditetapkan. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan keuangan dan penggunaan rekening perbankan yang lebih optimal.
- 2) Pendapatan Lain-lain yang Tidak Terduga
Realisasi pendapatan lain-lain mencapai 18.850,46% dari estimasi, menunjukkan adanya sumber pendapatan yang tidak terduga, seperti penerimaan kembali belanja barang dan modal dari tahun anggaran sebelumnya.
- 3) Pendapatan Denda yang Meningkat
Pendapatan denda mencapai Rp20.869.184.027,00 atau 1.995,39% dari estimasi, dengan kontribusi dari

denda penyelesaian pekerjaan pemerintah dan denda administratif lainnya. Ini menunjukkan adanya penegakan hukum yang lebih ketat dalam pelaksanaan proyek pemerintah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis faktor pemicu selisih anggaran dan realisasi pendapatan pada Kementerian Keuangan Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerimaan perpajakan dalam negeri terealisasi 102,16% dari anggaran yang telah ditetapkan. Faktor pemicu terjadinya selisih diatas anggaran terhadap realisasi pendapatan pada Kementerian keuangan karena adanya indikator-indikator positif dalam penerimaan pajak, stabilitas aktivitas ekonomi, dan kontribusi sektor pertambangan berdampak pada peningkatan realisasi pendapatan pajak dalam negeri. Meskipun masih terdapat tantangan di beberapa sektor dalam pencapaian target penerimaan perpajakan negara.
2. Penerimaan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional terealisasi 88,47% dari anggaran APBN yang telah ditetapkan. Penurunan nilai impor dan fluktuasi harga komoditas utama menjadi faktor pemicu selisih anggaran diatas realisasi pendapatan pajak perdagangan internasional, baik untuk bea masuk maupun bea keluar.
3. Penerimaan Negara Non Pajak pada Badan Layanan Umum terealisasi 106,94% lebih besar dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 45.911.619.196.000. Faktor yang mempengaruhi selisih realisasi diatas anggaran karena adanya peningkatan pendapatan dari jasa layanan perbankan dan pengelolaan dana pendidikan.
4. Realisasi Penerimaan Negara Non Pajak Lainnya sebesar Rp 1.349.430.601.906,00 atau 160,88% dari target yang ditetapkan dalam APBN, yaitu sebesar Rp 838.790.494.000. Faktor pemicu terjadinya selisih anggaran dan realisasi pendapatan

karena adanya peningkatan pendapatan bunga dan pengelolaan keuangan, serta adanya sumber pendapatan tidak terduga dan peningkatan pendapatan denda, menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan berhasil mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan negara bukan pajak. Meskipun terdapat tantangan dalam beberapa sektor lain, hasil ini mencerminkan kemampuan pemerintah untuk beradaptasi dan meningkatkan pendapatan secara efektif.

5. REFERENSI

- [1] Olin, L. V. M., Herdi, H., & Goo, K. E. (2024). ANALISIS FAKTOR PEMICU TERJADINYA SELISIH ANGGARAN DENGAN REALISASI PENDAPATAN, LABA DAN BIAYA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) WAIR PU'AN KABUPATEN SIKKA. *Jurnal Accounting UNIPA*, 3(1), 369–386.
- [2] Cellya, Agustin, U. C., Andika, L., Gaol, L. F. N., & Tamba, A. Y. (2024). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 524–532.
- [3] Patrisya Putri Utami, Amira Dwi Aryani, Nur Aini Putri Daryanti, Siti Hindun, & Azahra Elsa Mayori. (2024). Analisis Faktor Pemicu Selisih Anggaran dengan Pendapatan Direktorat Jendral Hortikultura. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4(1), 209–218. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v4i1.3493>
- [4] Lona, S. S., Perseveranda, M. E., & Manafe, H. A. (2023). Analisis Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja. *Owner*, 7(1). <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1486>
- [5] Susanti, A., Riadi, S., & Sari, D. (2021). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI REALISASI ANGGARAN PADA LAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai*, 5(3), 153–162.
- [6] Albab, U. M., & Halim, A. (2017). ANALISIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (STUDI PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN DAERAH KEMENTERIAN KEUANGAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA). *Accounting and Business Information System Journal*, 5(4), 1–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/abis.v5i4.59262>